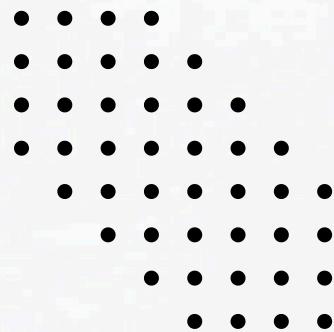




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan
2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2021-2026.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2025 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025 . Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Dinkominfo Kota Pekalongan. Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu

membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Dinkominfo Kota Pekalongan. dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Arif Karyadi, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19711017 199903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan total 36 (enam) indikator kinerja, dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut :

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83.50

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebesar 83,50 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik target yang ditetapkan Sangat Baik (skor 88,31-100)

berdasarkan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun penilaian 2025, Nilai KIP Kota Pekalongan sebesar 93.18 dengan predikat MENUJU INFORMATIF sehingga capaian untuk indikator Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kota Pekalongan sebesar 95.86%.

3. Indikator Indeks domain tatakelola SPBE target ditetapkan 3.40

Berdasarkan Penilaian Indeks SPBE yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB capaian indeks domain tatakelola SPBE Kota Pekalongan sebesar 3,30. Sehingga capaian untuk Indikator Indeks domain tatakelola SPBE sebesar 97.06%

4. Indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral target ditetapkan 98,50.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo diperoleh hasil 99,12%, sehingga capaian Indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 100,627%.

5. Indikator Indeks tata kelola KAMI target ditetapkan II tingkat

Berdasarkan penilaian indeks tata kelola KAMI diperoleh hasil III+ dengan demikian capaian untuk indikator indeks tata kelola KAMI sebesar 300%.

Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 12.966.649.489,00 atau 94,55% dari total pagu anggaran sebesar Rp 13.713.461.000,00 Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kendala yang dihadapi :

1. Efisiensi Anggaran Membatasi Ruang Pelaksanaan Program

Kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2026 berdampak pada keterbatasan alokasi dana yang tersedia bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Kondisi ini mengharuskan penyesuaian perencanaan, pengurangan skala kegiatan, serta penundaan beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Penurunan Intensitas Aktivitas dalam Mendukung Target Kinerja

Terbatasnya anggaran berimplikasi pada berkurangnya intensitas aktivitas, baik dalam pengembangan layanan digital, pengelolaan informasi publik, maupun peningkatan kapasitas sumber daya pendukung. Hal tersebut mempengaruhi

kecepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Optimalisasi Kinerja di Tengah Keterbatasan Sumber Daya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menghadapi tantangan dalam menjaga efektivitas dan kualitas pelaksanaan program di tengah keterbatasan anggaran dan aktivitas. Diperlukan strategi prioritas program serta pemanfaatan sumber daya secara optimal agar target kinerja tetap dapat dicapai secara efisien.

Langkah kedepan :

1. Prioritisasi Program dan Fokus pada Layanan Esensial

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan akan melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan dengan memfokuskan anggaran dan sumber daya pada layanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat. Program yang tidak mendesak atau memiliki dampak rendah akan disesuaikan, sehingga kesinambungan pelayanan dasar tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Internal

Dalam rangka menjaga efektivitas pelayanan, Dinkominfo akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah tersedia serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi internal. Pemanfaatan sistem digital, integrasi aplikasi, serta penguatan peran sumber daya manusia yang ada diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan kebutuhan tambahan anggaran.

3. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan akan memperkuat sinergi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini diarahkan pada pemanfaatan bersama infrastruktur, data, dan kegiatan pendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik, sehingga target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
3. KONDISI APARATUR	5
4. SARANA DAN PRASARANA	8
5. ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026	15
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026	19
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
1. PENGUKURAN KINERJA	23
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	26
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
2.2. Capaian Kinerja Tujuan	29
2.3. Analisis Capaian Kinerja	30
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	55
4. PRESTASI YANG DIRAIH.....	62
5. INOVASI.....	65
BAB IV PENUTUP.....	66
1. Simpulan Umum capaian kinerja	66
2. Permasalahan dan Langkah Kedepan	66
3. Penutup	66
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan bergesernya peran negara dan pemerintah dari peranannya sebagai pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang utama untuk dapat dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan paradigma peran pemerintahan (*governance*) yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik serta melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pembangunannya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa segala bentuk dan hasil akhir pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku stakeholder utama, pengguna layanan, dan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah tersebut disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berkomitmen bahwa sejak tahap penyusunan Perjanjian Kinerja hingga tahap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada akhir tahun anggaran, senantiasa ter-publish kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara penuh untuk dapat melakukan pengawasan terhadap ketercapaian target masing-masing Perangkat Daerah dalam periode anggaran tertentu.

LKJIP sendiri disusun dengan tujuan menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota, selaku pemberi mandat dan kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. LKJIP juga sekaligus digunakan sebagai alat evaluasi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Berkaitan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 berikut akan disajikan secara lengkap LKJIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain sebagai pemenuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, LKJIP ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) merupakan suatu Perangkat Daerah bentukan baru Dinas Tipe B, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tugas, pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2021, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
6. Bidang Infrastruktur dan Statistik
7. Seksi Statistik
8. Bidang Aplikasi dan Persandian
9. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
10. UPTD
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan beserta seksi-seksinya adalah sebagai berikut :

A. Tugas

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan Walikota.

Pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No. 71 tahun 2021 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
2. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
7. penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

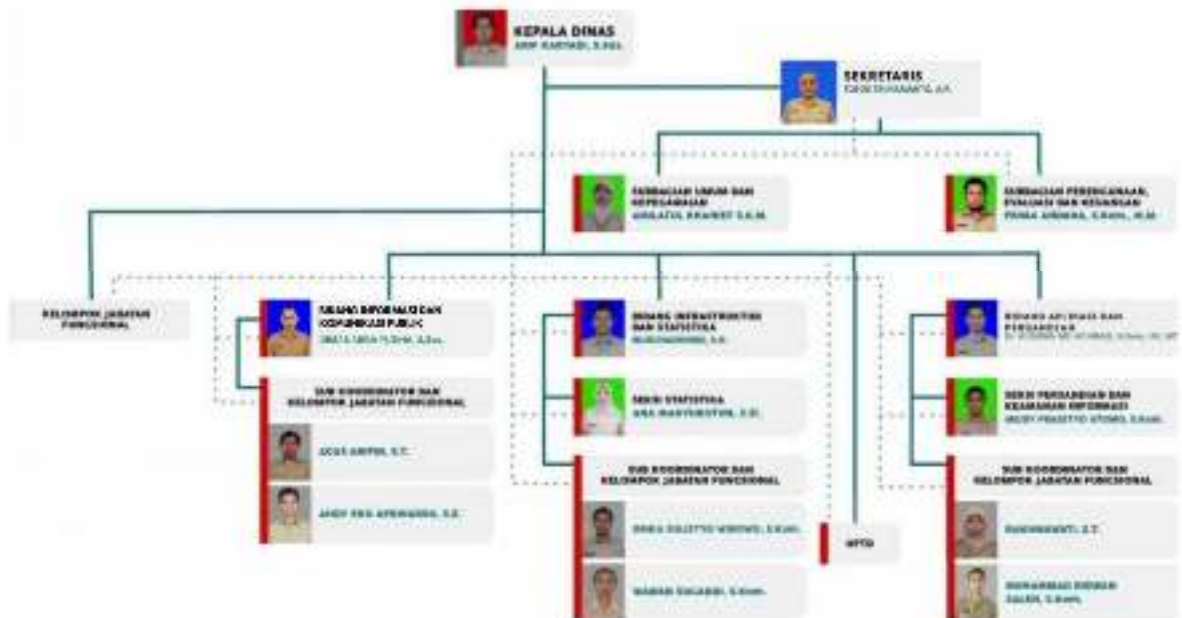
Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah No. 68 tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016

Tentang Kedudukan dan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan diperbarui dengan Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2021 tentang TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik;
6. Bidang Infrastruktur dan Statistik;
7. Seksi Statistik;
8. Bidang Aplikasi dan Persandian;
9. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
10. Kelompok Jabatan Fungsional;

 Bagan Susunan Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



3. KONDISI APARATUR

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kesemuanya berjumlah 126 orang. Bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan/Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	Jumlah	Persentase
PNS	30	23.8 %
Jabatan Struktural	9	7.1 %
Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda	4	3.1 %
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	1.5 %
JF Statistisi Pertama	1	0.7 %
JF Sandiman Pertama	1	0.7 %
JF Pranata Humas Pertama	1	0.7 %
JF Pranata Komputer Terampil	2	1.5 %
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	2.3 %
Jabatan Fungsional Umum	7	5.5 %
PPPK Penuh Waktu	3	2.3 %
PPPK Paruh Waktu	77	61.1 %
Non PNS	16	12.6 %
- Tenaga Kegiatan Dinas Kominfo	8	6.3 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Radio Kota Batik	3	2.3 %
- Tenaga Kegiatan LPPL Batik TV	5	3.9 %
Jumlah	126	100%

Sedangkan berikut ini merupakan komparasi jumlah PNS dan Non PNS pada Dinkominfo Kota Pekalongan, yang mana jumlah Non PNS lebih banyak dibandingkan jumlah keseluruhan PNS-nya : PNS = 30 , PPPK Penuh Waktu = 3 , PPPK Paruh Waktu = 77 , NON PNS = 16.

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Persentase	
		2024	2025	2024	2025
1	Golongan I	0	0	0	0%
2	Golongan II	4	4	13.3%	12.1%
3	Golongan III	23	23	76.6%	69.6%
4	Golongan IV	3	3	10.3%	9%
	Jumlah PNS	30	30	100%	90.9%
5	PPPK	0	3	0	9%
	Jumlah PPPK	0	3	0	9%
	Jumlah Total	30	33	100%	100%

Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					Persentase				
		2024		2025			2024		2025		
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PPPK PW	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PPPK PW
1	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.9%
2	SMP	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.9%
3	SMA	1	-	1	-	38	3.3%	-	0.9%	-	34.5%
4	D3	3	-	4	2	9	10%	-	3.6%	1.8%	8.1%

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					Persentase				
		2024		2025			2024		2025		
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PPPK PW	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PPPK PW
5	DIV	-	-	1	-	-	-	-	0.9%	-	-
6	S1	23	-	21	1	28	76.6%	-	19%	0.9%	25.4%
7	S2	2	-	2	-	-	6.6%	-	1.8%	-	-
8	S3	1	-	1	-	-	3.3%	-	0.9%	-	-

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Presentase	
		2024	2025	2024	2025
PNS					
A	Struktural				
	II.A	-	-	-	-
	II.B	1	1	3.3%	3.3%
	III.A	1	1	3.3%	3.3%
	III.B	3	3	10%	10%
	IV.A	4	4	13.3%	13.3%
	IV.B	-	-	-	-
	JUMLAH A	9	9	30%	30%
B	Jabatan Fungsional				
	JF Penyederhanaan Birokrasi	6	6	20%	20%
	JF Statistisi Pertama	1	1	3.3%	3.3%
	JF Sandiman Pertama	1	1	3.3%	3.3%
	JF Pranata Humas Pertama	1	1	3.3%	3.3%
	JF Pranata Komputer Terampil	2	3	6.6%	10%
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	3	10%	10%

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Presentase	
		2024	2025	2024	2025
	Jabatan Fungsional Umum	7	6	23.3%	20%
	Jumlah B	21	21	70%	70%
Jumlah PNS		30	30	100%	100%
PPPK PENUH WAKTU					
	Jabatan Fungsional	-	2	-	66.6%
	Jabatan Fungsional Umum	-	1	-	33.3%
Jumlah PPPK PENUH WAKTU		-	3	-	100%
PPPK PARUH WAKTU					
	Jabatan Fungsional Umum	-	77	-	100%
Jumlah PPPK PARUH WAKTU		-	77	-	100%

4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo, sarana yang dimanfaatkan meliputi fasilitas perkantoran, peralatan kerja, serta sarana pendukung operasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Prasarana yang tersedia mencakup gedung perkantoran, infrastruktur jaringan dan sistem informasi, serta utilitas pendukung lainnya. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas dan pembaruan secara bertahap seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan layanan.

Adapun gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 daftar Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Tower crane	2
2.	Genset	3
3.	Mobil Dinas	8
4.	Motor Dinas	16
5.	Lemari Besi	16
6.	Lemari Kayu	6
7.	Rak Besi	7
8.	Filling Cabinet	25
9.	Mesin Canting	1
10.	Brandkas	2
11.	Lemari Kaca	1
12.	Container	1
13.	CCTV	21
14.	Alat penghancur kertas	1
15.	Rak Kayu	1
16.	Mesin Absensi	11
17.	Display	10
18.	Proyektor	7
19.	Meja kerja kayu	23
20.	Meja Rapat	10
21.	Meja Telepon	2
22.	Meja resepsionis	1
23.	Meja bundar	1
24.	Kursi Rapat	132
25.	Kursi biasa	25
26.	Bangku tunggu	6
27.	Kursi lipat	33
28.	Meja komputer	49
29.	Sofa	6
30.	Kursi tangan	5
31.	Meja tulis	33

No.	Nama Barang	Jumlah
32.	Vacum cleaner	1
33.	A.C Window	20
34.	A.C Split	39
35.	Kipas angin	3
36.	Televisi	15
37.	Loudspeaker	3
38.	Sound system	14
39.	Microphone	47
40.	UPS	80
41.	Camera video	5
42.	Camera film	20
43.	Dispenser	3
44.	Tangga aluminium	1
45.	Handy cam	11
46.	Alat pemadam	14
47.	Meja kerja pejabat	5
48.	Meja kerja pegawai	14
49.	Meja tamu	1
50.	Meja operator	1
51.	Meja rapat pejabat	2
52.	Kursi kerja pejabat	21
53.	Lemari buku	1
54.	Master control	1
55.	Batteray charger (Peralatan Studio Audio)	7
56.	Encoder/decoder	5
57.	Headphone	15
58.	Rak peralatan	4
59.	Tripod camera	11
60.	Lensa camera	10
61.	Camera digital	4
62.	Lampu blitz kamera	3
63.	Peralatan studio video	16
64.	Kamera udara	2
65.	Telephone	6
66.	Handy Talky	7

No.	Nama Barang	Jumlah
67.	Facsmile	3
68.	Handphone	4
69.	Alat Komunikasi Radio	6
70.	Peralatan Jaringan	16
71.	Peralatan Pemancar	30
72.	Feeder lain-lain	1
73.	Audio Processor	3
74.	Mixer	2
75.	Stabilizer	1
76.	TV Monitor	7
77.	Audio monitor	1
78.	Transmision electorn microscope	1
79.	Physical property	2
80.	Converterr/transducer	69
81.	Transmitter	4
82.	Screen pembaras	1
83.	Orgen	1
84.	Analog To Digital Converter (ADC)	4
85.	Mini monitor	1
86.	Mini komputer	2
87.	Komputer jaringan lain-lain	3
88.	P.C Unit	98
89.	Laptop/Netbook	39
90.	Card reader	3
91.	CPU	20
92.	Hard disk	58
93.	Scanner	5
94.	Speaker komputer	1
95.	Monitor	6
96.	Printer	24
97.	Hard disk eksternal	4
98.	Peralatan personal komputer	8
99.	Server	29
100.	Peralatan jaringan lain-lain	441
101.	Modem	25

No.	Nama Barang	Jumlah
102.	Repeater and Transciever	2
103.	Terminal	1
104.	Rak server	4
105.	Firewall	1
106.	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3
107.	Incinerator (Heat Generating Equipment)	1
108.	Lampu UV	2
109.	Lighting Mechanic	5
110.	Head set	4
111.	Mini Viewer	2
112.	Photo Tustel	1
113.	Camera Adaptor	1
114.	Mixer PVC	1
115.	Splitzer Tape	1
116.	Power Supply (Peralatan Studio Video	2
117.	Teleprompter	2
118.	Video mixer	7
119.	Video Switcher	3
120.	Lighting Stand Tripod	4
121.	DC Converter	3
122.	Camera Electronic	3
123.	Video Distribution Amplifier	2
124.	Audio Cassette Recorder	2
125.	Digital Audio Taperecorder	1
126.	Compact Disc Recorder	1
127.	Set Studio Light Signal	5
128.	Wireless	16

Dalam pengelolaannya, Diskominfo melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin guna menjaga keberlanjutan fungsi dan mencegah penurunan kualitas. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan jumlah dan spesifikasi peralatan tertentu serta kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, perencanaan pengadaan secara bertahap sesuai prioritas, serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang tersedia telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ke depan, peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana akan terus diupayakan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5. ISU STRATEGIS

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam merumuskan lingkungan strategis, Dinkominfo Kota Pekalongan menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinkominfo dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a. Adanya perubahan bentuk organisasi dari Kantor menjadi Dinas Tipe B.
- b. Budaya inovasi terhadap ragam layanan publik yang cukup kuat.
- c. Kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan Modal operasional, seperti: peralatan dan operasional monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Pekalongan, Infrastruktur SPBE.
- d. Peningkatan Kualitas Publikasi dengan memanfaatkan media dan LPPL Batik TV dan Radio Kota Batik.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa Kelemahan internal yang menghambat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Dinkominfo dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- a. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Informatika.

- b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan peralatan siaran pada Batik TV dan radio kota batik.
- c. Masih adanya keterbatasan anggaran diklat untuk mendapatkan upgrade ilmu dari lembaga yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misinya, antara lain :

- a. Berkembangnya teknologi dari sisi infrastruktur dan aplikasi sehingga semakin banyak membuka peluang kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Adanya peluang dukungan dan kerjasama penerapan SPBE dari lembaga / organisasi lain.
- c. Adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan informasi publik di Kota Pekalongan.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman terhadap berlangsungnya kegiatan Dinkominfo dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain :

- a. Masih adanya respon dari beberapa OPD dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- b. Kurangnya monitoring dari sisi keamanan sistem dan infrastruktur dalam pengelolaan SPBE Tingkat Kota Pekalongan
- c. Kurangnya manajemen dalam mengelola aset TIK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota : meningkatkan tata kelola yang efektif dan efisien		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatkan kualitas layanan publik	indeks kepuasan masyarakat	86,72%
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD	83.50
Program Dinas Komunikasi dan Informatika : program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika : meningkatkan keterbukaan informasi publik	nilai keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat kota	97,20 Skor
Sasaran Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Sangat Baik (88,31 - 100)
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	90,00%
Tujuan : mengoptimalkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)	indeks SPBE	3,34 Indeks

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Sasaran : Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	3,40
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	9,35%
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	62,42%
Tujuan : meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	laju pemanfaatan data statistik sektoral	50%
Sasaran : Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	98,50%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
Tujuan : mewujudkan keamanan informasi daerah	indeks keamanan informasi (KAMI)	II+ tingkat
Sasaran : Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	lil tingkat
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	9,35%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100%

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Target Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD	indeks	penghitungan nilai SAKIP tahun N yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota Pekalongan	inspektorat daerah
2	meningkatnya layanan informasi publik	kinerja unit pelayanan informasi publik	mutu pelayanan	dihitung berdasarkan permenpan RB No. 14 tahun 2017	dinkominfo
3	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	Indeks SPBE tahun N	dinkominfo
4	tersedianya data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100%	dinkominfo
5	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	tingkat	penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI)	dinkominfo

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai SAKIP OPD	skor	85,00	86,00	87,00	87,70	83,50	83,70
2	meningkatnya layanan informasi publik	kinerja unit pelayanan informasi publik	mutu pelayanan	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	Baik (nilai 76,61 - 88,30)	sangat baik (nilai 88,31 - 100)	sangat baik (nilai 88,31 - 100)	sangat baik (nilai 88,31 - 100)
3	meningkatnya tata kelola SPBE	indeks domain tata kelola SPBE	indeks	2,75	2,85	2,95	3,32	3,40	3,40
4	tersedianya data statistik sektoral	presentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	66	68	70	98,50	98,50	98,50
5	terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks tata kelola KAMI	tingkat	I	I	I	II	II	II

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kominfo
Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan :				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.72
2	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.20
3	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks	3.34
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	Persen	50
5	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	tingkat	II+
Sasaran :				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83.50
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.40
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	98.50

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	tingkat	II

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Rp 6.233.486.000,00	APBD-P
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 5.073.865.000,00	APBD-P
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.227.292.000,00	APBD-P
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 86.960.000,00	APBD-P
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 96.858.000,00	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{target}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83.50	83.50	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (88,31 - 100)	Baik (87,51)	87,51	berhasil
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.40	3.30	97,06	sangat berhasil
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	Persen	98.50	99,12	100,62	Sangat berhasil
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	III+	300	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (satu) target;
- Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 134% dengan kategori Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	87.00	87.60	83.40	83.50	▲
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 - 100)	Baik (87,51)	▼
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2.40	3.20	3.30	3,30	●
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektora	Persen	98.91	98.22	94,84	99,12	▲
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	II	III+	III+	●

Keterangan :

▲ = Naik

● = Tetap

▼ =Turun

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun
2025 dengan target akhir Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83.50	87.80	95,10	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (87,51)	Sangat Baik (88,31 - 100)	87,51	Berhasil
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.30	3.34	98,80	Sangat Berhasil
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	99.12	98.50	100.57	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	III+	300	Sangat Berhasil

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	A	BB - A	100	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (87,51)	n/a	n/a	n/a
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.30	n/a	n/a	n/a
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	99.12	n/a	n/a	n/a

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kota Pekalongan yang tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada level Provinsi / Nasional / Internasional karena perbedaan indikator kinerja dan satuan.

2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86.72	89,01	102,64	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.20	93,18	95,86	Sangat Berhasil
3	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	indeks	3.34	3,84	114,97	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	Persen	50.00	22.44	44,87	Tidak berhasil
5	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat	II+	II+	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- a. Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 (tiga) target;
- b. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 (dua) target;
- c. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 146,84 % dengan kategori Sangat Berhasil

2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	85.00	indeks	87.60	83.40	83.50	83.50	100%	83.70

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 83.50 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Tabel 3.8. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1	Bapperida	88.70
2	DLH	85.95
3	Dindagkop-UKM	85.70
4	Inspektorat Daerah	84.75
5	BPKAD	84.60
6	BKPSDM	84.00
7	DPMPPA	83.55
8	Dinkominfo	83.50
9	DKP	83.27
10	Dinkes	83.25
11	DPUPR	83.05
12	Dindukcapil	82.95

13	Setda	81.85
14	Dindik	78.50
15	Dinparbudpora	78.15
16	DPMPTSP	78.00
17	Kec. Selatan	77.15
18	Dinhub	77.00
19	Kec. Utara	76.65
20	Kec. Barat	76.50
21	Kec. Timur	76.45
22	Dinperpa	76.40
23	Dinsos P2KB	76.35
24	Dinarpus	76.10
25	BPBD	76.00
26	Satpol P3KP	75.50
27	Dinperinaker	75.45
28	Set DPRD	75.00
29	Dinperkim	74.80
30	Bakesbangpol	73.75

Perbandingan indikator sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat Kota Pekalongan dan Provinsi pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,50	A
2	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	Indeks	73,28	BB

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pemanfaatan inovasi pelayanan belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan telah melakukan pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, inovasi tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja OPD. Sebagian inovasi belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur serta belum sepenuhnya dikaitkan dengan sasaran strategis, sehingga dampaknya terhadap peningkatan nilai SAKIP belum optimal.

2. Pengukuran kinerja dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas masih perlu penguatan

Pengukuran kinerja OPD masih cenderung berfokus pada pencapaian output kegiatan, sementara pengukuran outcome dan manfaat program belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja dan berkontribusi terhadap belum tercapainya target Nilai SAKIP OPD secara maksimal.

Upaya perbaikan kedepan :

1. Peningkatan integrasi inovasi pelayanan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan akan melakukan penguatan integrasi inovasi pelayanan ke dalam dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja OPD. Upaya ini dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan relevan terhadap sasaran strategis, sehingga pelaksanaan inovasi pelayanan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian kinerja dan peningkatan akuntabilitas OPD.

2. Penguatan pengukuran kinerja berbasis outcome dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja

OPD akan melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome serta meningkatkan kualitas analisis capaian kinerja. Hasil evaluasi kinerja akan dimanfaatkan secara konsisten sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, guna mendorong peningkatan efektivitas program/kegiatan dan pencapaian target Nilai SAKIP OPD secara optimal.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan mengapa kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	21.257.000	18.561.000	18.551.300	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjang capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 melalui penerapan manajemen kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja memastikan program dan kegiatan selaras dengan sasaran strategis, sementara evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja OPD.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.345.643.000	Rp4.326.270.000	3.764.935.654	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berperan penting dalam menunjang capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Administrasi keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan mendukung keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program, serta memastikan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja OPD dan berkontribusi terhadap peningkatan Nilai SAKIP.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan mengapa kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp143.110.000	Rp138.110.000	130.270.892	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menunjang capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 melalui pengelolaan sumber daya aparatur yang tertib, profesional, dan berbasis kinerja. Administrasi kepegawaian yang baik mendukung penataan tugas, penilaian kinerja pegawai, serta keselarasan antara kompetensi aparatur dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja OPD dan memperkuat akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp296.196.000	Rp250.156.000	249.523.789	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berperan penting dalam menunjang capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 dengan menyediakan dukungan operasional yang efisien, tertib, dan terkoordinasi. Pelaksanaan administrasi umum yang baik memastikan kelancaran proses birokrasi, pengelolaan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan OPD, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp632.380.000	Rp597.380.000	576.764.614	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berperan strategis dalam menunjang capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 dengan memberikan dukungan teknis, layanan, dan fasilitas yang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Pelaksanaan jasa penunjang yang profesional dan tepat waktu memastikan kelancaran operasional, efisiensi sumber daya, serta keterpaduan antar unit, sehingga memperkuat efektivitas dan akuntabilitas kinerja OPD secara keseluruhan.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp443.014.000	Rp898.009.000	882.317.058	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 dengan memastikan aset daerah terpelihara secara optimal,

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan mengapa kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
Daerah				aman, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Pemeliharaan yang tertib dan terencana meningkatkan efisiensi penggunaan barang milik daerah, memperlancar operasional, serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas kinerja OPD secara keseluruhan.

Dari tabel diatas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumberdaya masing-masing kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Anggaran: Rp. 18.561.000 Realisasi Anggaran: Rp.18.551.300 (99%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1% yang berasal dari fotocopy:	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 4.326.270.000 Realisasi Anggaran: Rp.3.764.935.654 (87.02%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 12.98% yang berasal dari : adanya kekosongan formasi sekretaris dan mutasi keluar PNS	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 4.326.270.000 Realisasi Anggaran: Rp. 3.764.935.654 (87.02%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 12.98% yang berasal dari : adanya kekosongan formasi sekretaris dan mutasi keluar PNS	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 138.110.000 Realisasi Anggaran: Rp.130.270.892 (94.32%) Dari total anggaran,	Pemanfaatan PPL dalam menyebarkan informasi berperan dalam efisiensi SDM pranata humas	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

	menunjukkan adanya hemat 5,68% yang berasal dari : sisa realisasi anggaran		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 250.156.000 Realisasi Anggaran: Rp.249.523.789 (99,74%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.24% yang berasal dari : sisa realiasi anggaran	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: Rp. 597.380.000, Realisasi Anggaran: Rp. 576.764.614 (96,54%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 3.45% yang berasal dari sisa realisasi anggaran	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: Rp. 898.009.000 Realisasi Anggaran: Rp. 882.317.058 (98,25%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1,75% yang berasal dari sisa realisasi anggaran	Pemanfaatan BMD untuk menunjang kegiatan pemerintahan dikelola dengan selektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1%), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12,98%), Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (5,68%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (3,45%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0,46%), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1,75%).
2. Pengoptimalan SDM yang ada melalui pembagian sesuai tugas dan fungsi, melakukan koordinasi yang efektif, pemanfaatan tenaga penunjang dan platform digital untuk penyelesaian tugas.
3. Pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu.

Sasaran 2 : Meningkatkan layanan informasi publik

Capaian indikator sasaran Meningkatkan layanan informasi publik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Kinerja Unit Pelayanan informasi publik	85.00	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)	Baik (Skor 87,51)	87,51	Sangat Baik (skor 88,31 - 100)

Indikator meningkatnya layanan informasi publik merupakan indikator kinerja mandiri kota pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun provinsi.

Tabel 3.11 Perbandingan nilai KIP Kota Pekalongan dengan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
1	Kabupaten Sukoharjo	99,45	Informatif
2	Kabupaten Wonosobo	98,36	Informatif
3	Kota Semarang	97,74	Informatif
4	Kabupaten Kendal	97,28	Informatif
5	Kota Surakarta	96,55	Informatif
6	Kabupaten Purbalingga	94,92	Informatif
7	Kota Salatiga	94,78	Informatif
8	Kabupaten Kebumen	93,64	Informatif
9	Kota Magelang	93,49	Informatif
10	Kabupaten Rembang	93,43	Informatif
11	Kota Pekalongan	93,18	Informatif
12	Kota Tegal	92,81	Informatif
13	Kabupaten Cilacap	92,64	Informatif

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
14	Kabupaten Demak	92,61	Informatif
15	Kabupaten Wonogiri	92,13	Informatif
16	Kabupaten Tegal	91,59	Informatif
17	Kabupaten Karanganyar	91,57	Informatif
18	Kabupaten Semarang	91,38	Informatif
19	Kabupaten Temanggung	91,34	Informatif
20	Kabupaten Klaten	90,51	Informatif
21	Kabupaten Jepara	90,45	Informatif
22	Kabupaten Brebes	90,09	Informatif
23	Kabupaten Pati	89,83	Menuju Informatif
24	Kabupaten Kudus	89,67	Menuju Informatif
25	Kabupaten Banyumas	88,39	Menuju Informatif
26	Kabupaten Grobogan	88,25	Menuju Informatif
27	Kabupaten Blora	87,91	Menuju Informatif
28	Kabupaten Pemalang	87,58	Menuju Informatif
29	Kabupaten Purworejo	85,13	Menuju Informatif
30	Kabupaten Sragen	84,72	Menuju Informatif
31	Kabupaten Magelang	84,15	Menuju Informatif
32	Kabupaten Pekalongan	83,95	Menuju Informatif

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perubahan dan penambahan indikator penilaian belum sepenuhnya terantisipasi

Belum tercapainya target Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik antara lain dipengaruhi oleh adanya penambahan poin dan indikator penilaian yang belum disampaikan secara rinci pada saat proses penilaian oleh KIP Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menyebabkan Unit Pelayanan Informasi Publik belum

sepenuhnya menyesuaikan pemenuhan dokumen, standar layanan, dan eviden pendukung sesuai dengan indikator penilaian terbaru.

2. Penyesuaian pelaksanaan layanan dan pemenuhan eviden belum optimal

Adanya penambahan poin penilaian berdampak pada perlunya penyesuaian terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk kelengkapan administrasi, dokumentasi, dan standar operasional pelayanan. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut belum dapat dilakukan secara optimal pada tahun berjalan, sehingga mempengaruhi nilai capaian kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik secara keseluruhan.

3. Keterbatasan waktu dalam menindaklanjuti dinamika kebijakan penilaian

Informasi mengenai penambahan poin penilaian diperoleh setelah proses persiapan dan pelaksanaan penilaian berjalan, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan indikator tambahan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya capaian kinerja yang diperoleh, meskipun Unit Pelayanan Informasi Publik telah melaksanakan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Upaya Perbaikan kedepan :

1. Penguatan koordinasi dan pemutakhiran informasi indikator penilaian

Unit Pelayanan Informasi Publik akan meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan kebijakan dan indikator penilaian. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh perubahan dan penambahan poin penilaian dapat diantisipasi sejak awal dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan serta pemenuhan standar layanan informasi publik.

2. Penyempurnaan standar pelayanan dan kelengkapan eviden pendukung

OPD akan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan standar operasional pelayanan informasi publik sesuai dengan indikator penilaian terbaru, termasuk peningkatan kelengkapan dokumen, administrasi, dan eviden pendukung. Pemenuhan eviden akan dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi guna mendukung peningkatan nilai kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik.

3. Peningkatan kesiapan dan evaluasi kinerja layanan informasi publik

Unit Pelayanan Informasi Publik akan meningkatkan kesiapan pelaksanaan penilaian melalui evaluasi kinerja secara berkala serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh aspek penilaian dapat dipenuhi secara optimal, sehingga mendorong peningkatan capaian kinerja pada periode penilaian berikutnya.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran 2

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten /kota	5.163.566.000	5.073.865.000	4,958,616,910	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di pemerintah daerah, termasuk di Kota Pekalongan, berperan strategis dalam menunjang pencapaian target Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik tahun 2025 karena melalui pengelolaan yang efektif, informasi publik dapat disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan IKP mendorong partisipasi publik, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah, serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk memperluas jangkauan layanan informasi. Dengan demikian, pengelolaan IKP menjadi dasar bagi unit pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan, memenuhi indikator kinerja, dan memastikan target 2025 dapat tercapai secara optimal.

Dari tabel diatas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran: Rp5.073.865.000 Realisasi Anggaran: Rp. 5.046.516.626 (99.46%) Dari total anggaran,	Melalui perencanaan komunikasi yang terintegrasi, pemanfaatan kanal informasi digital, serta standarisasi alur kerja diseminasi informasi, kebutuhan akan pekerjaan yang bersifat berulang	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

	menunjukkan adanya hemat 0,54% yang berasal dari sisa realisasi anggaran	dan manual dapat ditekan. Hal ini memungkinkan aparatur memfokuskan waktu dan kompetensinya pada tugas-tugas strategis dan bernilai tambah, sekaligus mengurangi tumpang tindih peran antar perangkat daerah. Dengan tersedianya informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses, beban klarifikasi dan layanan informasi juga berkurang, sehingga kinerja SDM menjadi lebih optimal, efektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	
--	--	---	--

Kesimpulan efisiensi :

Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 0,54 %
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola SPBE

Capaian indikator sasaran Meningkatnya tata kelola SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.75	indeks	3.20	3.30	3.40	3.30	97.06	3.40

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen

SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Tabel 3.14 Hasil Evaluasi SPBE pemerintah daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,56	Memuaskan
2.	Pemerintah Kab. Banyumas	4,45	Memuaskan
3.	Pemerintah Kota Surakarta	4,41	Memuaskan
4.	Pemerintah Kab. Rembang	4,28	Memuaskan
5.	Pemerintah Kota Semarang	4,27	Memuaskan
6.	Pemerintah Kab. Klaten	4,22	Memuaskan
7.	Pemerintah Kota Salatiga	4,11	Sangat Baik
8.	Pemerintah Kab. Demak	4,09	Sangat Baik
9.	Pemerintah Kab. Karanganyar	4,03	Sangat Baik

10.	Pemerintah Kab. Magelang	4,02	Sangat Baik
11.	Pemerintah Kab. Tegal	3,97	Sangat Baik
12.	Pemerintah Kab. Semarang	3,91	Sangat Baik
13.	Pemerintah Kota Pekalongan	3,84	Sangat Baik
14.	Pemerintah Kab. Temanggung	3,80	Sangat Baik
15.	Pemerintah Kab. Jepara	3,75	Sangat Baik
16.	Pemerintah Kab. Pemalang	3,38	Baik
17.	Pemerintah Kab. Brebes	3,29	Baik

Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Keterbatasan Integrasi Sistem dan Proses Digital – Beberapa aplikasi dan layanan pemerintahan di Kota Pekalongan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga alur informasi dan koordinasi antar OPD tidak optimal. Hal ini menyebabkan efektivitas pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menurun dan kontribusi terhadap pencapaian indeks tata kelola SPBE belum mencapai target 97,06%.
2. **Kapasitas SDM dan Penerapan Standar SPBE yang Belum Maksimal** – Tingkat pemahaman dan kompetensi SDM terkait tata kelola SPBE di beberapa unit masih perlu ditingkatkan, termasuk penerapan kebijakan, prosedur, dan keamanan data. Kekurangan ini berdampak pada konsistensi pelaksanaan SPBE dan menurunkan skor indeks domain tata kelola di Diskominfo.

Upaya Perbaikan kedepan :

1. Integrasi Sistem dan Proses Digital – Meningkatkan interoperabilitas antar aplikasi dan layanan elektronik antar OPD dengan melakukan audit sistem, integrasi basis data, dan penyelarasan prosedur kerja digital, sehingga alur informasi lebih cepat, akurat, dan efisien.
2. Peningkatan Kapasitas SDM SPBE – Menyelenggarakan pelatihan rutin,

sertifikasi kompetensi, dan pendampingan implementasi SPBE bagi pegawai, agar pemahaman dan keterampilan SDM sesuai dengan standar tata kelola SPBE.

3. Penerapan Standar, Kebijakan, dan SOP SPBE Secara Konsisten – Menyusun dan menegakkan kebijakan, pedoman, dan SOP tata kelola SPBE di seluruh unit kerja, termasuk mekanisme keamanan data dan monitoring kinerja sistem.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan – Membentuk tim monitoring dan evaluasi SPBE untuk menilai implementasi, mengidentifikasi hambatan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga skor indeks meningkat secara bertahap.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17,462,000	17,360,000	Kegiatan Pengelolaan nama domain dan subdomain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di lingkup pemerintah daerah sangat mendukung pencapaian indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE, karena pengelolaan domain yang terstandar menjamin kepastian identitas layanan digital, keamanan data, dan keteraturan administrasi sistem elektronik. Dengan domain dan subdomain yang dikelola secara konsisten, integrasi antar aplikasi dan layanan pemerintah menjadi lebih mudah, koordinasi antar OPD lebih efektif, serta penerapan kebijakan SPBE lebih terkontrol, sehingga meningkatkan skor tata kelola SPBE dan mendekati capaian target indeks yang ditetapkan.
Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2.330.428.000	2,209,830,000	2,101,427,460	Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pencapaian Indeks Domain Tata Kelola SPBE, karena melalui pengelolaan yang sistematis, layanan elektronik pemerintah

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				dapat terintegrasi, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan penerapan E-Government yang efektif, proses bisnis pemerintahan menjadi lebih efisien, koordinasi antar OPD lebih lancar, dan kepatuhan terhadap standar SPBE lebih terjamin, sehingga secara langsung meningkatkan skor tata kelola SPBE dan membantu pemerintah daerah mendekati target indeks yang ditetapkan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran: Rp. 17.462.000 2. Realisasi Anggaran: Rp17.360.000 (99.41%) 3. Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.59% yang berasal dari sisa anggaran belanja 	<p>pelaksanaan kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat beserta subdomain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan domain yang terpusat, tertib, dan terstandar memudahkan koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pengelolaan dan pembaruan layanan digital, serta meminimalkan kendala teknis yang berpotensi menyita waktu dan tenaga aparatur. Dengan struktur subdomain yang jelas dan terkelola dengan baik, SDM tidak lagi terbebani oleh pengelolaan sistem yang terfragmentasi, sehingga dapat fokus pada pengembangan konten, peningkatan kualitas layanan publik, dan inovasi digital. Kondisi ini mendorong pemanfaatan SDM yang lebih optimal, efektif, dan efisien dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>
Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	<p>Anggaran: Rp. 2,209,830,000 Realisasi Anggaran: Rp17. 2,101,427,460 (95.09%)</p>	<p>Keberhasilan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah</p>

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 4.90% yang berasal dari sisa anggaran belanja : gaji tenaga kegiatan 1 orang yang mengundurkan diri	sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh oleh organisasi. Penerapan sistem digital yang terintegrasi pada proses administrasi, layanan publik, dan manajemen internal mampu menyederhanakan alur kerja, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta menekan potensi duplikasi tugas antar unit kerja. Dengan dukungan aplikasi dan basis data yang saling terhubung, aparatur dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, akurat, dan terukur, sehingga waktu dan kapasitas SDM dapat dialihkan pada fungsi-fungsi strategis dan pengambilan keputusan. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas organisasi, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kinerja.	ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran Kegiatan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 0.59 %, dan kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 4,90%.
2. Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengefisiensi SDM.
3. Pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu

sasaran 4 : Tersedianya data statistik sektoral

Capaian indikator sasaran tersedianya data statistik sektoral adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	presentase ketersediaan data statistik sektoral	66	persen	98,22	94,84	98.50	99.12	100.62	98,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa guna mendukung terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam Satu Data Terpadu Daerah (SDTD).

Dinas Kominfo selaku Wali Data Satu Data Terpadu Daerah mempunyai tugas untuk mengelola dan menyediakan data statistik sektoral yang disajikan dalam Portal Satu Data Terpadu Daerah. Persentase ketersediaan data statistik sektoral menjadi indikator capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral urusan statistik pada Dinas Kominfo.

Indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Tabel 3.17 Presentase Keterisian Data SDTD tahun 2025

No.	OPD	Keterisian Data Sektoral		
		Jumlah Total Data	Jumlah Data Terisi	Persentase
1	BPN KOTA PEKALONGAN	4	4	100%
2	BAGIAN PBJ DAN MINBANG SETDA	33	33	100%
3	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	20	20	100%
4	DINARPUS	99	99	100%
5	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA SETDA	15	15	100%
6	BAGIAN ORGANISASI SETDA	23	23	100%
7	DPMPSTP	37	37	100%
8	KEC. PEKALONGAN UTARA	18	18	100%

No.	OPD	Keterisian Data Sektoral		
		Jumlah Total Data	Jumlah Data Terisi	Persentase
9	KEC. PEKALONGAN SELATAN	18	18	100%
10	BPS KOTA PEKALONGAN	77	77	100%
11	DINPERPA	197	197	100%
12	DPUPR	105	105	100%
13	DKP	47	47	100%
14	BAGIAN KESRA SETDA	20	20	100%
15	BAGIAN UMUM SETDA	3	3	100%
16	BAGIAN HUKUM SETDA	14	14	100%
17	BAPPERIDA	87	87	100%
18	KEC. PEKALONGAN BARAT	18	18	100%
19	BAGIAN PROKOMPIM SETDA	3	3	100%
20	KESBANGPOL	58	58	100%
21	DINPARBUDPORA	142	139	97.89%
22	RSUD	109	109	100%
23	DINDAGKOP & UKM	139	139	100%
24	KEC. PEKALONGAN TIMUR	18	18	100%
25	DINHUB	57	57	100%
26	DLH	179	179	100%
27	INSPEKTORAT	25	25	100%
28	DINPERKIM	58	58	100%
29	SATPOL P3KP	51	51	100%
30	BKPSDM	73	73	100%
31	DPMPPA	65	65	100%

No.	OPD	Keterisian Data Sektoral		
		Jumlah Total Data	Jumlah Data Terisi	Persentase
32	BPKAD	107	107	100%
33	BPBD	71	71	100%
34	SETWAN	49	35	71.43%
35	DINPERINAHER	98	98	100%
36	DINKOMINFO	105	105	100%
37	DINSOS P2KB	130	130	100%
38	DINDIK	412	412	100%
39	DINKES	229	219	95.63%
40	DINDUKCAPIL	69	69	100%
		3082	3055	99.12%

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pembina data sektoral (BPS), Walidata (Dinkominfo), Produsen data (OPD) dan Koordinator Forum Data (Bapperida) dalam penyediaan data statistik sektoral.
3. Adanya peran aktif tim pengelola data sektoral (petugas pengelola data OPD) dalam menyediakan data sektoralnya masing-masing.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	86,960,000	86,960,000	85,895,000	Kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota sangat menunjang

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Kabupaten/Kota				capaian target persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2025, karena melalui kegiatan ini pemerintah daerah secara sistematis dapat mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang akurat dan lengkap sesuai sektor masing-masing. Ketersediaan data yang terstruktur dan mutakhir memudahkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program, sekaligus memastikan bahwa target persentase ketersediaan data statistik sektoral tercapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran Rp. 86,960,00 Realisasi Anggaran: Rp. 85,895,000 (98.77%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.22% yang berasal dari: sisa anggaran belanja	Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meningkatkan efisiensi SDM melalui penyediaan data yang akurat, terstandar, dan mudah diakses, sehingga mengurangi duplikasi proses pengolahan data, mempercepat koordinasi antar perangkat daerah, dan memungkinkan aparatur lebih fokus pada analisis, perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan publik.	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 1.22 %
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

sasaran 5 : Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Capaian indikator sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks tata kelola KAMI	I	tingkat	II	III+	II	III+	300	II

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Standar SNI ISO/IEC 27001 mendapatkan pembaruan yaitu SNI ISO/IEC 27001:2022 yang dirilis pada tahun 2022. Sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), SNI ISO/IEC 27001 sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan supaya standar keamanan informasi tetap relevan dengan kondisi terkini.

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Keamanan Informasi dan Tata Kelola KAMI menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi pada pemerintah daerah telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan.

2. Implementasi pengamanan pada sistem elektronik, termasuk penguatan prosedur dan pengendalian internal, berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kematangan keamanan informasi.
3. Hasil pengukuran Indeks KAMI menjadi indikator keberhasilan dalam mendukung keandalan penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
4. Capaian ini mendukung terwujudnya tata kelola SPBE yang efektif dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan digital pemerintah.

berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.420.000	72,076,000	69,221,000	Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indeks Tata Kelola Keamanan Informasi (KAMI) melalui penerapan pengamanan informasi terstandar, seperti enkripsi, pengelolaan kunci sandi, serta penguatan kebijakan dan prosedur keamanan, guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi serta meningkatkan kepercayaan publik.
Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota	26.630.000	24,782,000	23,966,096	Kegiatan ini berkontribusi strategis dalam mendukung pencapaian target Indeks Tata Kelola Keamanan Informasi (KAMI) dengan memastikan terselenggaranya komunikasi antar perangkat daerah yang aman, terintegrasi, dan terstandar. Penetapan pola komunikasi sandi yang jelas memperkuat aspek tata kelola, pengendalian risiko, serta pengamanan aset informasi melalui pengaturan alur komunikasi, kewenangan, dan mekanisme pengamanan data, sehingga meningkatkan tingkat kematangan sistem keamanan informasi pemerintah daerah sesuai dengan indikator penilaian Indeks KAMI.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
<p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Anggaran: Rp. 72.076.000 Realisasi Anggaran: Rp. 69.221.000 (96.03%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 3.96% yang berasal dari sisa anggaran belanja</p>	<p>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdampak positif terhadap efisiensi SDM melalui penerapan sistem pengamanan informasi yang andal dan terstandar, sehingga meminimalkan risiko insiden keamanan, mengurangi beban penanganan berulang, dan memungkinkan aparatur bekerja lebih fokus, aman, serta produktif dalam mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>
<p>Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Anggaran: Rp. 24.782.000 Realisasi Anggaran: Rp. 23.966.096 (93.19%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 6.80% yang berasal dari sisa anggaran belanja</p>	<p>Keberhasilan kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh organisasi. Pola komunikasi sandi yang jelas, terstandar, dan terkoordinasi mempercepat pertukaran informasi rahasia antarperangkat daerah serta mengurangi kesalahan, pengulangan, dan hambatan dalam penyampaian pesan. Dengan alur komunikasi yang terstruktur, aparatur tidak lagi terbebani oleh proses klarifikasi dan koordinasi yang berlarut-larut, sehingga waktu dan tenaga SDM dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Efisiensi ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.</p>	<p>penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh organisasi. Sistem pengamanan informasi yang andal, terstandar, dan terintegrasi mampu meminimalkan risiko kebocoran data, gangguan sistem, serta insiden keamanan siber yang berpotensi menyita waktu dan tenaga aparatur untuk penanganan berulang. Dengan terjaminnya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, aparatur dapat bekerja dengan lebih fokus, aman, dan produktif tanpa terbebani oleh proses pengamanan manual yang kompleks. Hal ini memungkinkan pemanfaatan SDM secara lebih efektif untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.</p>

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3,29%, dan kegiatan Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota sebesar 6,80%.
2. Penyelenggaraan Persandian dan Penetapan Pola Hubungan komunikasi sandi yang terstandar di lingkungan pemerintah daerah kabupaten / kota memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi sumber daya manusia. Sistem pengamanan informasi yang andal mampu meminimalkan risiko insiden keamanan serta mengurangi beban kerja berulang, sementara pola komunikasi yang jelas dan terkoordinasi mempercepat pertukaran informasi serta menekan kesalahan dan hambatan koordinasi. Dengan demikian, aparatur dapat bekerja lebih fokus aman dan produktif, sehingga mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
3. Pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.713.461.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 12.966.649.489,00 atau sebesar 94,55%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 8.538.384.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.358.531.699,00. atau sebesar 97,89%. Adapun rincian pagu dan

realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.881.600	5.781.436.000	5.184.263.161	90,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.257.000	18.561.000	18.551.300	99,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.494.000	6.211.000	6.201.800	99,85
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.763.000	1.559.000	1.558.500	99,97
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	10.791.000	10.791.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.345.643.000	4.326.270.000	3.764.935.654	87,02
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.101.000	4.281.498.000	3.721.663.654	86,92
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perangkat Daerah	43.870.000	43.330.000	41.830.000	96,54
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.000	1.442.000	1.442.000	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.110.000	138.110.000	130.270.892	94,32
7	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	0	0	0
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	138.110.000	138.110.000	130.270.892	94,32

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
	Kegiatan Administrasi Umum	296.196.000	250.156.000	249.523.789	99,75
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.000	2.990.000	2.974.500	99,48
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.460.000	58.314.000	58.218.274	99,84
11	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	4.686.000	10.686.000	10.685.216	99,99
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.160.000	81.160.000	81.101.500	99,93
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.200.000	26.290.000	26.244.450	99,83
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	11.700.000	11.700.000	11.305.500	96,63
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	95.000.000	59.016.000	58.994.349	99,96
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.380.000	597.380.000	576.764.614	96,55
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	501.220.000	466.220.000	449.178.358	96,34
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.760.000	128.760.000	125.186.256	97,22
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	443.014.000	898.009.000	882.317.058	98,25

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
	Penunjang Urusan Pemerintah daerah				
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.800.000	209.130.000	207.218.158	99,09
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.614.000	589.214.000	577.289.846	97,98
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.600.000	99.665.000	97.809.054	98,14
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.163.566.000	5.073.865.000	5.046.416.626	99,46
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.163.566.000	5.073.865.000	5.046.416.626	99,46
22	Sub Kegiatan Relasi Media	1.238.652.000	1.332.761.000	1.328.753.768	99,70
23	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	43.660.000	25.310.000	25.300.000	99,96
24	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	151.980.000	114.020.000	113.099.716	99,19
25	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	20.000.000	2.600.000	2.600.000	100
26	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	571.210.000	568.110.000	562.913.881	99,09

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
27	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.008.568.000	2.901.568.000	2.887.859.969	99,53
28	Penyusunan Konten	129.496.000	129.496.000	125.889.292	97,21
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.350.428.000	2.227.292.000	2.118.787.460	95,13
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	95.710.000	93.881.999	98,09
29	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	20.000.000	17.462.000	17.360.000	99,42
30	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	86.420.000	78.248.000	76.521.999	97,79
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.330.428.000	2.131.582.000	2.024.905.461	95
31	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis	16.430.000	14.009.000	13.977.000	99,77
32	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	107.850.000	94.790.000	92.586.050	97,67
33	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	77.850.000	-	-	0
34	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan	375.448.000	374.925.000	319.546.918	85,23

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
	Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				
35	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	25.000.000	22.548.000	22.540.000	99,96
36	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.404.350.000	1.397.600.000	1.352.119.723	96,75
37	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	49.470.000	49.038.000	47.625.000	97,12
38	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	167.900.000	162.072.000	160.275.770	98,89
39	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	19.710.000	16.600.000	16.235.000	97,80
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86.960.000	86.960.000	85.895.000	98,78
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.960.000	86.960.000	85.895.000	98,78
40	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	50.910.000	50.910.000	49.986.000	98,19
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	36.050.000	36.050.000	35.909.000	99,61

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi 2025	%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	105.050.000	96.858.000	93.187.096	96,21
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.420.000	72.076.000	69.221.000	96,04
42	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jarig Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.400.000	6.352.000	6.352.000	100
43	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	51.800.000	48.736.000	46.044.000	94,48
44	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.220.000	16.988.000	16.825.000	99,04
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26.630.000	24.782.000	23.966.096	96,71
42	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.630.000	24.782.000	23.966.096	96,71

4. PRESTASI YANG DIRAIH

a. Pada Anugerah KPID Jawa tengah 2025 dinkominfo kota pekalongan meraih beberapa prestasi antara lain :

- Lembaga Penyiaran Publik Terbaik : BATIK TV
- presenter pria terbaik : Zulfan Arinata - Batik TV
- presenter wanita terbaik : Linda Rahmanita - Batik TV



b. Penghargaan Kota Informatif 2025 dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah



c. Pemerintah Daerah Terbaik Kelima oleh Gadjah Mada digital transformation governance index award



- d. Pemerintah Kota Pekalongan atas peringkat terbaik 3 smart branding "*Pekalongan world's city of Batik*" pada The Indonesia Smart Nation Award 2025



- e. Pengelolaan Digital Komunikasi Publik - GPR Award

5. INOVASI

- a. Aplikasi SIMEGA (Sistem Informasi Manajemen Pemagangan Dinkominfo) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemagangan (SIMEGA) yang digunakan untuk mengelola administrasi pemagangan, laporan kegiatan, penilaian, serta penerbitan sertifikat digital secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan Umum capaian kinerja

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung serta melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2025 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa Dinkominfo Kota Pekalongan telah berupaya memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas utamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 mengalami peningkatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Permasalahan dan Langkah Kedepan

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ke depannya akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Peningkatan kemampuan kerja dari SDM (ASN dan Non ASN) yang dimiliki.
- b. Peningkatan dukungan keuangan dan sarana prasarana untuk mencapai layanan komunikasi dan informasi sesuai standardisasi.
- c. Senantiasa memantau dan mengolah informasi yang diperoleh dari tren/kebutuhan masyarakat terkini dan dari hasil studi ke Perangkat Daerah sejenis.
- d. Melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informatika dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang diperlukan.

3. Penutup

Demikian laporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai realisasi rencana kerja tahun 2025.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja dari semua unsur yang terkait dari pimpinan, para bidang, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf dan tenaga kegiatan lainnya yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target program yang tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dimasa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and government), serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

LAMPIRAN

4. IKU PERUBAHAN 2021-2026
5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	85,00	85,00	86,00	87,00	87,60	83,50	83,70	Inspektorat Daerah	Dinkominfo
2	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja unit pelayanan informasi publik	Mutu Pelayanan	Dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	angat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	angat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Dinkominfo	Dinkominfo
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	Indeks SPBE Tahun N	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	2,75	2,75	2,85	2,95	3,32	3,40	3,40	Dinkominfo	Dinkominfo
4	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	Jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	66	66	68	70	98,50	98,50	98,50	Dinkominfo	Dinkominfo
5	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	I	I	I	I	II	II	II	Dinkominfo	Dinkominfo



Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan

Arif Karyadi, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF KARYADI S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

ARIF KARYADI S.Sos.
NIP. 19711017 199903 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.72 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	97.20 Skor	Formulasi : Tahapan Penilaian (pemeringkatan) : - pemenuhan website konten PPID - SAQ (Self Assessment Quesioner) - Verifikasi - Uji publik Formulasi = Rata-rata nilai semua tahapan penilaian Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
3.	Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	3.34 Indeks	Formulasi : Indeks SPBE tahun N dihitung berdasarkan Permenpan RB No, 59 Tahun 2020 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : KemenPAN RB
4.	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	50 Persen	Formulasi : $(\text{Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N} - \text{Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N} - 1) / \text{Jumlah pengunjung aplikasi pusaka tahun N} - 1$ Tipe Capaian: Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber Data : Dinkominfo

5.	Mewujudkan keamanan informasi daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II+ tingkat	Formulasi : Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI Tipe Capaian: Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber Data : Dinkominfo
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83.50 Indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya layanan informasi publik	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	5 Mutu Pelayanan	Formulasi : Dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo
3.	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	3.40 Indeks	Formulasi : Indeks domain tata kelola SPBE tahun N dihitung berdasarkan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : KemenPAN RB
4.	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	98.50 Persen	Formulasi : Jumlah data statistik sektoral yang diinput OPD dalam aplikasi PUSAKA / jumlah data yang ditargetkan x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo
5.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks tata kelola KAMI	II tingkat	Formulasi : Penilaian mandiri menggunakan tools indeks KAMI (komponen pendukung indeks KAMI) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkominfo

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.233.486.000	APBD-P
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.073.865.000	APBD-P
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.227.292.000	APBD-P
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 86.960.000	APBD-P
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 96.858.000	APBD-P

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Wali Kota Pekalongan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.



ARIF KARYADI S.Sos.
NIP. 19711017 199903 1 007